



KOTA BEKASI
2024

**PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN
INOVASI DAERAH**

INOVASI DAERAH

SIP-PALUR

(Sistem Informasi Pelaporan Pamor Kelurahan)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk mencapai percepatan pemenuhan pelayanan dasar maka perlu adanya pengaturan yang mendasari pelaksanaan deteksi dini pelayanan dasar masyarakat melalui pembentukan Satuan Tugas Pemantauan dan Monitoring (Satgas Pamor) di Kota Bekasi. Melalui pembentukan Satuan Tugas Pemantauan dan Monitoring (Satgas Pamor) proses penyelenggaraan pelayanan dasar menjadi lebih mudah, cepat dan berkualitas serta mengoptimalkan peran dan keberadaan pemerintah di tengah-tengah masyarakat dalam memberikan pelayanan publik.

Dalam pelaksanaannya, mencari dan mengumpulkan informasi yang diperlukan pemerintah dalam hal ini kelurahan sulit dilakukan karena beberapa sebab, diantaranya seperti kurangnya komunikasi antara pamor dengan pihak lingkungan yang dalam hal ini pengurus RW dan RT di wilayah kerjanya masing-masing yang menyebabkan keterlambatan waktu dalam pengumpulan data atau informasi yang dibutuhkan. Selain itu, mencari dan mengumpulkan informasi sulit dilakukan karena dalam penginventarisir data tersebut banyak ketidaksesuaian data yang dibutuhkan sehingga memperlambat dalam pengumpulan data.

SIP-PALUR (Sistem Informasi Pelaporan Pamor Kelurahan) merupakan inovasi yang dibentuk dengan memanfaatkan satgas pamor yang bertugas di setiap RW untuk membantu masyarakat dalam pelayanan jemput antar adminduk bagi warga dengan keterbatasan penguasaan teknologi dan yang memiliki mobilitas tinggi serta waktu yang sempit.

B. TUJUAN

Tiga tujuan singkat dari inovasi SIP-PALUR (Sistem Informasi Pelaporan Pamor Kelurahan), adalah :

1. Percepatan pemenuhan pelayanan dasar: Tujuan utama inovasi ini adalah untuk mencapai percepatan dalam pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat di Kota Bekasi. Dengan adanya Satuan Tugas Pemantauan dan *Monitoring* (Satgas Pamor) yang bekerja di setiap RW, diharapkan proses pelayanan dasar dapat berjalan lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan kemudahan penyelenggaraan pelayanan dasar: Dengan adanya Satgas Pamor dan implementasi sistem informasi pelaporan (SIP-PALUR), diharapkan penyelenggaraan pelayanan dasar menjadi lebih mudah, cepat, dan

berkualitas. Adanya sistem informasi ini akan membantu dalam pengumpulan data dan informasi yang diperlukan, sehingga pelayanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat secara lebih akurat.

3. Memfasilitasi warga dengan keterbatasan teknologi dan mobilitas tinggi: Salah satu tujuan inovasi SIP-PALUR adalah untuk membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan penguasaan teknologi dan mobilitas tinggi. Dengan adanya layanan jemput antar adminduk, warga yang sulit mengakses pelayanan administrasi dapat lebih terbantu, sehingga mereka tetap dapat menikmati pelayanan dasar yang dibutuhkan tanpa kesulitan yang berarti.

C. MANFAAT

Manfaat dari inovasi SIP-PALUR (Sistem Informasi Pelaporan Pamor Kelurahan) :

1. Percepatan pemenuhan pelayanan dasar: Dengan adanya SIP-PALUR dan Satgas Pamor, proses pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat di Kota Bekasi menjadi lebih cepat dan efisien.
2. Peningkatan kualitas pelayanan: Implementasi SIP-PALUR membantu dalam pengumpulan dan manajemen data, sehingga pelayanan dasar dapat ditingkatkan dalam hal kualitas dan akurasi.
3. Dukungan bagi warga dengan keterbatasan teknologi dan mobilitas tinggi: Warga yang memiliki keterbatasan teknologi dan mobilitas tinggi mendapatkan bantuan melalui layanan jemput antar adminduk, memastikan bahwa mereka juga dapat mengakses pelayanan dasar dengan mudah.

D. KECEPATAN PENCIPTAAN INOVASI DAERAH

Sejalan dengan semakin berkembangnya penerapan ilmu teknologi dan informasi pada pembangunan di Indonesia, studi-studi tentang inovasi kian menarik untuk terus dikaji, terutama kaitannya dengan kegiatan pembangunan. Adapun sifat-sifat ekstrinsik inovasi meliputi :

1. Kesesuaian (*compability*) inovasi dengan lingkungan setempat (baik lingkungan fisik, sosial budaya, politik, dan kemampuan ekonomis masyarakatnya).
2. Tingkat keunggulan relatif dari inovasi yang ditawarkan, atau keunggulan lain yang dimiliki oleh inovasi dibanding dengan teknologi yang sudah ada yang akan diperbaharui/digantikannya, baik keunggulan teknis (kecocokan dengan keadaan alam setempat, tingkat produktivitasnya), ekonomis (besarnya biaya atau keuntungannya),

manfaat non ekonomi, maupun dampak sosial budaya dan politis yang ditimbulkannya.

Adapun dalam inovasi ini, dilakukan dengan metode seefisien mungkin dan seefektif mungkin dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. **Proses kecepatan penciptaan inovasi daerah ini dikerjakan selama 1-3 bulan.**

Tahapan kegiatan dalam pembentukan inovasi ini dapat disajikan sebagai berikut:

[illegible]

[illegible]

E. PENGGUNAAN IT (INFORMASI DAN TEKNOLOGI)

Teknologi informasi saat ini telah berkembang sangat pesat. Penerapannya dapat menjadi sangat penting dan sangat membantu bagi pekerjaan manusia. Beberapa manfaat teknologi informasi antara lain mendapatkan informasi secara cepat dan mudah, efisiensi waktu dan biaya, serta mempermudah komunikasi. Dalam bidang perpustakaan, pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan agar lebih efektif dan efisien. Sebagai contoh seorang pengguna ingin mengunjungi sebuah perpustakaan di kota tertentu, tetapi ia belum mengetahui lokasi perpustakaan tersebut. Salah satu solusi yang ditawarkan terkait dengan teknologi informasi dalam bidang perpustakaan adalah dengan menggunakan peta digital yang diimplementasikan melalui aplikasi *smartphone*. Dengan peta digital, setiap pengguna dapat memakai peta yang lebih interaktif dari sekadar gulungan kertas. Kelebihan yang lain adalah pada peta digital mudah disimpan dan dipindahkan dari satu media penyimpanan ke media penyimpanan yang lain. Untuk hal itu inisiator inovasi menerapkan kemudahan layanan informasi dengan didukung aplikasi *android*. berikut layanan informasi dapat diakses dengan menginstal hal berikut :



F. SIGNIFIKANSI

Sesuai yang disampaikan Ketua Disdukcapil Kota Bekasi pada Maret tahun 2022 terkait layanan administrasi kependudukan tingkat Rukun Warga (RW) di Kota Bekasi :

1. Seluruh permohonan penertiban dokumen administrasi kependudukan dilaksanakan secara daring (*online*) dengan menggunakan *website* baik dimohonkan secara mandiri maupun dibantu oleh Satgas Pamor.
2. Permohonan hanya dilayani pada kantor Kecamatan se-Kota Bekasi, MPP dan GPP, bagi warga yang kesulitan mengakses website SIP-PALUR dan memiliki keterbatasan teknologi dapat dilayani di tingkat RW melalui Satgas Pamor sesuai dokumen adminduk pemohon.
3. Agar masyarakat mengurus sendiri permohonan penerbitan dokumen administrasi kependudukan sehingga terhindar dari pihak lain yang menawarkan pelayanan diluar aplikasi atau *website*.

Mekanisme pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan Satgas Pamor Kelurahan melalui SIP-PALUR (Sistem Informasi Pelaporan Pamor Kelurahan), yaitu :

1. Warga menyampaikan permohonan dan persyaratan melalui whatsapp kepada petugas pamor selaku admin kelurahan.
2. Petugas pamor menginput permohonan pada website SIP-PALUR dan menyampaikan dokumen persyaratan melalui SIP-PALUR kepada penyelia kecamatan.
3. Apabila persyaratan sudah lengkap maka diverifikasi dan di *approve* oleh penyelia kecamatan dan selanjutnya dicetak sesuai jenis layanan.
4. Setiap 2 hari sekali penyelia kecamatan akan mendistribusikan produk layanan kependudukan kepada masing-masing petugas pamor RW.
5. Petugas pamor RW mendistribusikan produk pelayanan administrasi kependudukan kepada warga masyarakat.

BAB II

KERANGKA PIKIR

A. KEBAHARUAN INOVASI

Tujuan deteksi dini pelayanan dasar satgas pamor melalui *website* adalah SIP-PALUR (Sistem Informasi Pelaporan Pamor Kelurahan) adalah untuk :

- A. Percepatan pelayanan dan penyelesaian permasalahan.
- B. Mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan secara cepat dan tepat.
- C. Meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
- D. Menghindari kesenjangan dan menjadi jembatan fasilitasi antara program pemerintah dengan masyarakat serta.
- E. Menghadirkan pemerintah di tengah–tengah masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada (Peraturan Wali Kota Bekasi No. 65 tentang Deteksi Dini Pelayanan Dasar Masyarakat Melalui Pembentukan Satuga Tugas Pemantauan dan Monitoring di Kota Bekasi, 2017).

B. DESAIN INOVASI

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Kelurahan Kota Bekasi. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tentang Deteksi Dini Pelayanan Dasar Masyarakat Melalui Pembentukan Satuan Tugas Pemantauan dan Monitoring Kota Bekasi. Satuan Tugas Pemantauan dan Monitoring yang selanjutnya disebut Satgas Pamor adalah Aparatur Non ASN Kecamatan yang mempunyai tugas tambahan untuk melakukan pelayanan publik, pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektifitas program, memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran.

Peran satgas pamor dalam pelayanan dasar masyarakat antara lain meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menghindari kesenjangan dan menjadi jembatan fasilitasi antara program pemerintah dengan masyarakat. Satgas Pamor sangat berperan besar kepada 2 pihak, pihak masyarakat dalam memenuhi pelayanan dasar dan kepada pihak pemerintah dalam hal mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk memenuhi program pemerintah dengan masyarakat.

Berdasarkan kondisi saat ini, Lurah sebagai inisiator memandang perlu adanya sebuah media atau aplikasi yang dapat digunakan oleh Satgas Pamor untuk membantu pekerjaan di wilayah tanggung jawabnya masing-masing dalam hal pelaporan data wilayah. Penerapan

sebuah sistem informasi berbasis *online* bisa digunakan untuk mempermudah Satgas Pamor dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan.

Dengan menggunakan aplikasi sistem informasi berbasis online, Satgas Pamor dapat melakukan penginputan / perubahan data di wilayah kerjanya masing-masing secara *real time*. Dengan diterapkannya aplikasi sistem informasi berbasis *online*, diharapkan dapat membantu pekerjaan Satgas Pamor dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan oleh Pemerintah secara cepat dan tepat (Laporan Inovasi Daerah BAPPELITBANGDA, 2022).

C. PROSES INOVASI YANG DIHASILKAN

Inovasi daerah yang kami buat memiliki mekanisme pelayanan yang cepat dan dapat beradaptasi dalam lingkungan yang dinamis, sehingga perusahaan dituntut untuk mampu menciptakan pemikiran baru, gagasan baru dan menawarkan produk yang inovatif serta peningkatan pelayanan yang memuaskan pengguna. Inovasi kami bisa menghasilkan proses hanya dalam waktu 1 hari.

BAB III

PENUTUP

Kegiatan inovasi menjelaskan bahwa SIP-PALUR dan pembentukan Satuan Tugas Pemantauan dan *Monitoring* (Satgas Pamor) di Kota Bekasi, adalah :

1. Pentingnya pengaturan deteksi dini pelayanan dasar: Untuk mencapai percepatan pemenuhan pelayanan dasar, diperlukan pengaturan deteksi dini yang efisien dan tepat guna. Hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki proses penyelenggaraan pelayanan dasar.
2. Peran strategis Satgas Pamor: Dengan pembentukan Satgas Pamor di setiap RW, peran mereka dalam memantau dan memonitor pelaksanaan pelayanan dasar menjadi krusial. Mereka berperan dalam memastikan bahwa proses pelayanan berjalan dengan baik, cepat, dan berkualitas, serta menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
3. Solusi untuk kendala dalam pengumpulan informasi: Masalah kurangnya komunikasi dengan pengurus RW dan RT serta ketidaksesuaian data dalam menginventarisir data menjadi kendala dalam pengumpulan informasi. SIP-PALUR menjadi solusi dengan memanfaatkan teknologi dan dukungan Satgas Pamor untuk membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan teknologi dan mobilitas tinggi dalam mengakses pelayanan administrasi.

Dengan demikian, inovasi SIP-PALUR dan peran aktif Satgas Pamor dapat mempercepat dan meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat di Kota Bekasi, serta memperkuat peran pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan responsif.



KOTA BEKASI
2024